

Strategi Peningkatan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah Kabupaten Muna

Najarudin¹, Muhammad Suriyadarman Rianse², Wa Ode Sartika³

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Manajemen dan Bisnis, Universitas Karya Persada Muna, Raha, Indonesia

Email: najarudin@gmail.com

² Program Studi Manajemen, Fakultas Manajemen dan Bisnis, Universitas Karya Persada Muna, Raha, Indonesia

Email: daruriansel00@gmail.com

² Program Studi Manajemen, Fakultas Manajemen dan Bisnis, Universitas Karya Persada Muna, Raha, Indonesia

Email: wadesartika@gmail.com

Abstrak

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna adalah Retribusi Daerah, dimana pencapaian Retribusi Daerah Kabupaten Muna selama lima tahun terakhir yaitu Tahun 2012-2016 masih sangat rendah dan bersifat fluktuatif yaitu terjadi perbedaan jumlah dan terkadang mencapai target dan terkadang tidak mencapai target yang telah ditentukan sietiap tahunnya. Berdasarkan realitas tersebut, menunjukkan bahwa terjadi persoalan dalam pengelolaan Retribusi Daerah di Kabupaten Muna. Oleh sebab itu, maka penulis merasa tertarik ingin mengetahui persoalan dalam pengelolaan Retribusi Daerah di Kabupaten Muna, dengan mengangkat judul “Strategi Peningkatan Retribusi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna)”.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis strategi peningkatan retribusi kabupaten Muna, (2) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan retribusi Kabupaten Muna. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan untuk pengumpulan data digunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan retribusi di Kabupaten Muna adalah Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi yang diterapkan adalah (a) mengoptimalkan pungutan jenis retribusi yang telah memiliki Perda dan (b) mencegah tingkat kebocoran yang dilakukan oleh juru tagih sebelum di setor ke kas daerah dan (c) melakukan penyesuaian tarif terhadap retribusi yang lama. Strategi Ekstensifikasi yang diterapkan adalah (a) melahirkan jenis retribusi baru, (b) memperluas ruanglingkup jenis retribusi yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan retribusi di Kabupaten Muna adalah sebagai berikut: (a) Kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, (b) Sarana yang digunakan, (c) Faktor pengawasan, (d) Faktor koordinasi.

Kata Kunci: Strategi, Retribusi Daerah, Aset Pendapatan Daerah, kabupaten Muna

Abstract

One of the sources of Regional Original Income of Muna Regency is Regional Retribution. The achievement of Regional Retribution of Muna Regency over the past five years, from 2012 to 2016, has been very low and fluctuating, with differences in the amount, sometimes reaching and sometimes not reaching the target set each year. Based on this reality, it indicates that there are problems in the management of Regional Retribution in Muna Regency. Therefore, the author is interested in understanding the problems in the management of Regional Retribution in Muna Regency, with the title "Strategy for Increasing Regional Retribution (Study at the Revenue, Finance, and Asset Management Office of Muna Regency)". The objectives of this study are: (1) To describe and analyze the strategy for increasing Muna Regency retribution, (2) To describe and analyze the factors influencing the development of Muna Regency retribution. This research is a qualitative descriptive study and for data collection used purposive sampling. Data collection methods used were interviews, observation, and documentation. Informants in this study numbered 9 people. The data analysis techniques used in this study were data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the research results, it can be concluded that the strategies for increasing levies in Muna Regency include intensification and extensification strategies. The intensification strategies implemented are: (a) optimizing the collection of levies that already have regional regulations, (b) preventing leakage by collectors before they are deposited into the regional treasury, and (c) adjusting tariffs for existing levies. The extensification strategies implemented are: (a) introducing new levies, (b) expanding the scope of existing levies. The factors influencing the increase in levies in Muna Regency are as follows: (a) Public awareness of paying levies, (b) Facilities used, (c) Supervision factors, (d) Coordination factors.

Keywords: Strategy, Regional Levies, Regional Revenue Assets, Muna Regency

1. Pendahuluan

Terwujudnya Otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Daerah, telah menjadikan kabupaten dan kota menjadi titik tumpuan bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Siahian:2005:1). Menurut Marhayudi (Rusdi dan Sayuti:2012:793) untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Berdasarkan hal tersebut, bahwa Pemerintah Daerah harus memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan bagi daerah untuk menggali potensi daerah yang ada untuk dijadikan sebagai sumber keuangan daerah

yaitu dengan meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). sumber Pendapatan Asli Daerah ada 4 yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Retribusi daerah adalah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2005: 616).

Salah satu problema yang dihadapi oleh sebahagian daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Realitas mengenai rendahnya PAD di sejumlah daerah mengakibatkan Daerah tidak berdaya dan selalu bergantung pada bantuan pembiayaan atau subsidi dari dana pemerintah pusat.

Kondisi seperti yang disebutkan diatas terjadi juga pada pemerintah Daerah Kabupaten Muna, dimana PAD Kabupaten Muna lima tahun terakhir masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat ketergantungan Kabupaten Muna selama lima tahun terakhir mulai 2012-2016 terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi yaitu sekitar 96% (sumber Dinas PPKAD Kab. Muna). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna adalah Retribusi Daerah, dimana pencapaian Retribusi Daerah Kabupaten Muna selama lima tahun terakhir yaitu Tahun 2012-2016 masih sangat rendah. Berdasarkan realitas tersebut, menunjukkan bahwa terjadi persoalan dalam pengelolaan Retribusi Daerah di Kabupaten Muna. Oleh sebab itu, maka penulis merasa tertarik ingin mengetahui persoalan dalam pengelolaan Retribusi Daerah di Kabupaten Muna, dengan mengangkat judul “*Strategi Peningkatan Retribusi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna)*”

2. Tinjauan Pustaka

Konsep Strategi

Menurut Assauri (2011:3) mendefinisikan strategis sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai, upaya untuk mengkomunikasikan apa saja yang akan dikerjakan, oleh siapa mengerjakan, bagaimana mengerjakannya, serta kepada siapa saja hal-hal tersebut pula dikomunikasikan, dan perlu dipahami mengapa hasil kinerja tersebut perlu dinilai. Sedangkan menurut Lynch dalam Wibisono (2006:50-51) mengatakan strategi perusahaan adalah merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat.

Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita, 2007). Menurut Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui

sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Konsep Retribusi Daerah

Menurut Widjaja (2002:6) retribusi adalah suatu pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduk secara perorangan. Sedangkan menurut Mahmudi (2010:25) retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah.

Ciri-Ciri Retribusi

Ciri-ciri pokok Retribusi Daerah menurut Siahian (2005: 7) yaitu:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;
3. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;
4. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut Siahian (2005 : 620) Retribusi Daerah dibagi atas tiga golongan yaitu:

- a. Retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:103) terdapat 3 Objek Retribusi daerah:

- a. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Strategi Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah

Menurut Siregar (2004:366) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

1. Intensifikasi

Poin Intensifikasi ini, daerah harus berupaya mencegah seminimal mungkin tingkat kebocoran yang terjadi sebelum disetor kekas daerah.

2. Ekstensifikasi

Pada poin ekstensifikasi ini, daerah perlu menggali sumber-sumber retribusi yang baru melalui pengembangan, perluasan pelayanan, dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah

Menurut Halim (2004:49) dalam kajian tentang keuangan daerah, pemerintah dalam menganalisis masalah dalam penerimaan sumber-sumber keuangan daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah yang akan diterima oleh pemerintahan daerah belum optimalnya pajak dan retribusi daerah, dimana terjadinya keterbatasan sumber daya atau petugas pelaksana operasional dilapangan, masih banyaknya tingkat kebocoran atau kelolosan dimana belum efektifnya pemberlakuan sanksi dan kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan.

3. Metodologi Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat dilingkungan kantor pemerintah Kabupaten Muna yaitu pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Sedangkan jadwal penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan Februari Tahun 2018 sampai dengan selesai.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu merupakan suatu penelitian yang mendeskripsikan karakteristik masalah yang berkaitan dengan karakteristik dari subjek yang diteliti.

Ruang Lingkup Penelitian

Penulis dalam menjaga agar penelitian dapat berjalan dengan terarah dan tidak menimbulkan perspektif yang bias, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini pada strategi peningkatan retribusi daerah di Kabupaten Muna.

Informan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan sebanyak 9 orang yaitu:

1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
2. Koordinator Bidang Retribusi,
3. Tiga orang Staf Petugas Lapangan,

4. Bendahara Penerima Dinas Pekerja Umum,
5. Bendahara Penerima Dinas Peternakan,
6. Bendahara Penerima Dinas Pertanian,
7. Bendahara Penerima Dinas Perindag,
8. Kepala Bidang Pengelolaan Perizinan dan Tempat Pelelangan Ikan Dinas Perikanan, serta
9. Tiga orang unsur dari masyarakat yaitu dari sopir truk, sopir angkot dan pedagang dipasar

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan melakukan kesimpulan atas temuannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah Peneliti sendiri, dengan menggunakan alat bantu berupa lembar Interview Guide (pedoman wawancara), alat perekam, lembar catatan dan kamera.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung sistematis yang dilakukan peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (interviewee) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini wawancara dengan informan dilakukan secara mendalam (depth interviewe) dengan cara wawancara terstruktur, tidak terstruktur dan tatap muka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang diperoleh haruslah lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi yaitu terjun langsung kelapangan dan mencari data mengenai objek-objek penelitian tersebut yang berasal dari pihak lain berupa undang-undang, buku, surat kabar, dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan lokasi penelitian dan masalah penelitian. Peneliti juga mendokumentasikan beberapa data dalam bentuk gambar foto pada lampiran guna mendukung validitas dan kebenaran data yang diteliti. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang telah kredibel/dapat dipercaya.

4. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiono (2009:310) mengungkapkan bahwa observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sedangkan

menurut Sanafiah Faisal dalam Sugiono (2009:310) mengklasifikasi observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi yang secara terang-terangan, dan observasi tak berstruktur. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan ketiga jenis observasi tersebut dengan tujuan agar mendapatkan data yang lebih mendalam dan akurat.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.
2. Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilah, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, sehingga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Simpulan atau verifikasi yaitu peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada data awal didukung oleh bukti-bukti yang sangat valid dan konsisten pada saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

4. Hasil dan Pembahasan

Strategi Peningkatan Retribusi Daerah di Kabupaten Muna

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam rangka meningkatkan retribusi daerah adalah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

1. Intensifikasi

Intensifikasi memiliki makna sebagai usaha untuk mengefektifkan pemungutan retribusi terhadap subjek dan objek retribusi yang sudah dikenakan sebelumnya dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan sosialisasi retribusi lainnya secara lebih giat, teliti dan ketat. Upaya intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna adalah mengoptimalkan pungutan jenis retribusi yang telah memiliki Perda dan mencegah tingkat kebocoran yang dilakukan oleh juru tagih sebelum di setor ke kas daerah serta dan melakukan penyesuaian tarif retribusi yang lama

Pemerintah Kabupaten Muna dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sektor retribusi yang telah memiliki Perda melakukan rapat perencanaan kepada seluruh SKPD yang mengelolah retribusi. Dalam rapat tersebut seluruh SKPD yang mengelolah retribusi menyampaikan target yang akan dicapai selama satu tahun yang akan datang. Dalam rapat tersebut pula, seluruh SKPD menyampaikan hal-hal yang akan dibutuhkan oleh para SKPD dalam menunjang kelancaran pemungutan retribusi.

Setelah perencanaan selesai tentunya tahap selanjutnya adalah seluruh SKPD yang mengelolah retribusi melaksanakan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam proses implementasi inilah yang menjadi kunci keberhasilan dari program yang telah ditentukan, sebaik apapun perencanaan yang dibuat apabila proses implementasinya tidak baik maka program tersebut tidak akan dicapai dengan baik.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muna adalah berusaha mencegah tingkat kebocoran yang dilakukan oleh para juru tagih yang telah ditunjuk oleh masing-masing SKPD yang mengelolah retribusi daerah.

Dalam rangka mencegah tingkat kebocoran yang dilakukann oleh para juru tagih, maka pemerintah Kabupaten Muna memaksimalkan fungsi pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal yang dapat mengawasi proses pemungutan retribusi daerah baik dilakukan secara periodik maupun semesteran.

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Muna melalui BPPKAD melakukan pengawasan terhadap penggunaan karcis yang telah terporporasi oleh masing-masing SKPD.

Selain karcis yang dijadikan sebagai alat kontrol dalam mengawasi kinerja yang dilakukan oleh SKPD dalam memungut retribusi maka Pemerintah Daerah Melalui BPPKAD mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD). SKRD adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang tertuang. SKRD tersebut dipergunakan setelah terjadinya kesepakatan antara pemungut retribusi dengan wajib retribusi terhadap sejumlah uang yang harus dibayar oleh wajib retribusi. SKRD yang dipergunakan tersebut akan disetor kepada Badan Pendapatan. Dengan disetornya SKRD tersebut maka BPKAD dapat mengawasi pungutan yang dilakukan oleh setiap SKPD.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam mencegah tingkat kebocoran pada sektor retribusi dinilai masih belum maksimal dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya penagihan-penagihan yang dilakukan oleh kelompok lain selain juru tagih yang telah ditunjuk oleh SKPD masing-masing.

Upaya intensifikasi berikutnya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah melakukan penyesuaian tarif retribusi yang telah lama, dimana pada tahun 2017 Pemerintah daerah melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tahun 2013 tentang Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut selain terjadi penambahan terhadap jenis retribusi yang baru, juga akan diatur tentang tarif retribusi yang telah lama.

2. Strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna adalah (a) melahirkan jenis retribusi baru, (b) memperluas ruanglingkup jenis retribusi yang ada. Stategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna dalam meningkatkan penerimaan retribusi belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya upaya serius yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna dalam menggali potensi retribusi utamanya pada daerah-daerah dibagian wilayah pedesaan sehingga banyak objek-objek retribusi yang belum terdata

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Retribusi Daerah

Setiap kegiatan apapun tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang menghambat dan menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Identifikasi faktor-faktor tersebut cukup penting, sehingga untuk selanjutnya dapat diformulasikan langkah-langkah strategis yang dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan kegiatan tersebut. Sebagaimana dideskripsikan di atas bahwa target dan realisasi penerimaan retribusi terdapat kesenjangan dalam arti jumlah yang ditargetkan pada umumnya masih belum mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kesenjangan tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh dan setiap komponen retribusi memiliki kendala masing-masing secara spesifik. Di samping itu terdapat peluang-peluang yang memungkinkan untuk mengembangkan potensi-potensi retribusi yang ada, sehingga antara target dan realisasi dapat berjalan sesuai rencana. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain:

1. Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Retribusi

Kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar retribusi di Kabupaten Muna sampai sekarang masih rendah. Hal ini disebabkan karena terkadang pedagang membuat sendiri kios atau lods tempat jualannya, sehingga pada saat petugas juru tagih meminta pembayaran retribusi mereka beralasan tempat jualan yang mereka gunakan dibangun sendiri tanpa bantuan dari pemerintah.

2. Sarana yang Digunakan

Dalam upaya penciptaan kinerja pegawai pada SKPD-SKPD yang mengelolah retribusi daerah untuk dapat bekerja secara optimal, penciptaan kompensasi, pemberdayaan pegawai dan budaya organisasi, tidaklah akan mampu menciptakan kinerja pegawai yang baik tanpa dipenuhinya unsur-unsur penciptaan sarana kerja yang baik. Sarana kerja yang baik akan membuat pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. sarana kerja merupakan media bagi pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

Kendala sarana yang digunakan adalah adalah tidak adanya kendaraan operasional yang digunakan oleh para juru tagih dan kurangnya pos-pos PAD yang disediakan di tempat-tempat pemungutan retribusi.

3. Faktor Pengawasan

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan retribusi daerah adalah pengawasan. Aspek pengawasan sangat penting artinya dalam setiap kegiatan khususnya dalam pengelolaan retribusi. Bila aspek pengawasan terabaikan maka target yang telah ditetapkan tidak akan mampu dicapai.

Pengawasan yang dilakukan oleh SKPD terhadap petugas juru tagih retribusi masih sangat kurang sehingga para petugas juru parkir tersebut sesuka hati dalam melaksanakan tugasnya.

4. Faktor Koordinasi

Pelaksanaan koordinasi antar Dinas terkait penting artinya dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Koordinasi merupakan prinsip manajemen yang diarahkan untuk melakukan kegiatan secara terpadu.

Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan jajaran pemerintah yang ada dibawahnya yaitu pihak Kecamatan dan Desa selama ini belum pernah dilakukan dalam hal mendata potensi-potensi retribusi yang ada diwilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna dalam meningkatkan retribusi adalah ada dua yaitu satrategi intensifiaksi dan ekstensifikasi. Staretgi intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna adalah dengan cara (a) mengoptimalkan pungutan jenis retribusi yang telah memiliki Perda dan (b) mencegah tingkat kebocoran yang dilakukan oleh juru tagih sebelum di setor ke kas daerah. Strategi intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut belum dilaksanakan dengan maksimal yang dapat dilihat dari masih adanya jenis retribusi yang telah memiliki Perda tetapi tidak dilakukan pungutan. Selain itu juga capaian retribusi pada umumnya belum tercapai. Sedangkan strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna adalah (a) melahirkan jenis retribusi baru, (b) memperluas ruanglingkup jenis retribusi yang ada. Strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna adalah dengan melahirkan Peraturan Daerah Tahun 2013 Nomor 06 Tentang Retribusi Jasa Umum, Nomor 07 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan 08 Retribusi Perizinan Tertentu. Stategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna dalam meningkatkan penerimaan retribusi belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya upaya serius yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna dalam menggali potensi retribusi utamanya pada daerah-daerah dibagian wilayah pedesaan sehingga banyak objek-objek retribusi yang belum terdata
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan retribusi di Kabupaten Muna adalah sebagai berikut: (a) Kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, (b) Sarana yang digunakan, (c) Faktor pengawasan, (d) Faktor koordinasi

5.2. Limitasi

Agar penelitian dapat berjalan dengan terarah dan tidak menimbulkan perspektif yang bias, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini pada srategi peningkatan retribusi daerah di Kabupaten Muna dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan Retribusi Daerah di Kabupaten Muna

5.3. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Muna diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat wajib retribusi dengan cara melakukan sosialisasi lebih giat lagi dan pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya membayar retribusi
2. Pemerintah Kabupaten Muna dapat menyiapkan saran dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran penagihan retribusi

3. Pemerintah Kabupaten Muna melalui pimpinan SKPD masing-masing dapat meningkatkan pengawasan yang ketat kepada para juru tagih
4. Pemerintah Kabupaten Muna diharapkan dapat menggali potensi retribusi yang ada di wilayah pedesaan dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan dan Desa
5. Pemerintah Kabupaten Muna dapat memberikan anggaran yang cukup bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah untuk sering melakukan Uji Petik sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja para SKPD.
6. Pemerintah Kabupaten Muna dapat memperhatikan kesejahteraan juru tagih dengan baik, sebab merekalah yang menjadi ujung tombak dalam peningkatan pencapaian retribusi. Semakin baik mereka bekerja maka semakin baik pula peningkatan capaian retribusi.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Karya Persada Muna atas dukungan akademik dan fasilitas yang telah diberikan selama proses penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan dosen dan pustakawan yang telah membantu dalam pencarian dan pengolahan literatur yang digunakan dalam kajian ini.

Referensi

- Agostino, D., Arnaboldi, M., & Lema, M. D. (2022). New development: COVID-19 as an accelerator of digital transformation in public service delivery. *Public Money & Management*, 42(3), 219–222. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1764206>
- Chen, P., & Kim, S. (2023). The Impact of Digital Transformation on Innovation Performance—The Mediating Role of Innovation Factors. *Heliyon*.
- Cordella, A., & Paletti, A. (2019). Government as a platform, orchestration, and public value creation: The Italian case. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101409.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494.
- Gao, D., Yan, Z., Zhou, X., & Mo, X. (2023). Smarter and Prosperous: Digital Transformation and Enterprise Performance. *Systems*.
- Gil-Garcia, J. R., Zhang, J., & Puron-Cid, G. (2020). Conceptualizing smartness in government: An integrative and multi-dimensional view. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101491. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101491>
- Janssen, M., & Estevez, E. (2013). Lean government and platform-based governance—Doing more with less. *Government Information Quarterly*, 30, S1–S8.
- Kraus, S., Schiavone, F., Pluzhnikova, A., & Invernizzi, A. C. (2021). Digital transformation in business and management research: An overview. *International Journal of Information Management*, 63, 102426.
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>

- Piening, E. P., & Salge, T. O. (2015). Understanding the antecedents, contingencies, and performance implications of process innovation in public services. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(4), 1185–1214.
- Susanti, N., Prasetyo, H., & Riyadi, A. (2023). Peran budaya organisasi dan kapabilitas digital dalam transformasi pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(2), 87–97.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
- Zhou, P., Zhou, S., Zhang, M., & Miao, S. (2023). Executive Overconfidence, Digital Transformation and Environmental Innovation: The Role of Moderated Mediator. *International Journal of Environmental Research and Public Health*.